



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta pada saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (2010-2012) menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat PBB tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini BPRD DKI Jakarta (2013-2016), yaitu sebesar 119,41% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. sedangkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 saat dikelola oleh BPRD DKI Jakarta sebesar 93,89% dengan kriteria nilai interpretasi efektif.
2. Kontribusi PBB-P2 DKI Jakarta terhadap penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 4 (empat) tahun periode 2013-2016 mengalami fluktuatif. Rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan Pajak Daerah yaitu sebesar 20,25% dengan kriteia nilai interprestasi sedang. sedangkan, rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 14,99% dengan kriteria nilai interprestasi kurang.
3. Pengalihan PBB-P2 DKI Jakarta dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah berdampak positif terutama pada penerimaan pajak daerah dimana pajak daerah pada tahun 2013 naik secara signifikan dari tahun sebelumnya. Namun perlu diakui bahwa kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



DKI Jakarta belum seefektif kinerja pemerintah pusat. Dapat dilihat dari rata-rata tingkat efektivitas pada tahun 2010-2012 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat efektivitas pada tahun 2013-2016.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat lebih optimal maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Karena kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang maka sebaiknya BPRD DKI Jakarta lebih meningkatkan potensi PBB-P2 yang sudah ada sebab, DKI Jakarta memiliki potensi PBB-P2 yang sangat besar dibandingkan daerah-daerah lain sehingga PBB-P2 memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan PAD.
2. Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus terus meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target PBB-P2 yang sudah ditetapkan misalnya dengan:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti UPPD, DJP, Kecamatan dan Kelurahan dan juga instansi lain yang terkait dalam pengelolaan PBB-P2 untuk dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 itu sendiri dan terlebih peningkatan PAD.
 - b. Memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Melakukan intergrasi data dari setiap bidang yang berada dalam wilayah kerja BPRD. Hal tersebut dapat menghindari perbedaan data dan memperkecil kesalahan serta melakukan transparansi hasil penerimaan pajak melalui *website* atau media lainnya guna menumbuhkan rasa percaya Wajib Pajak terhadap pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat.
- d. Meningkatkan penerimaan PBB-P2 dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah misalnya dengan menambah jumlah Mobiling (Mobil Keliling).
- e. Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pajak pada saat melayani Wajib Pajak yang ingin memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari wajib pajak mempunyai rasa enggan atau malas membayar kewajiban pajaknya karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang berdampak pada penerimaan PBB-P2

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.